

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PEDESAAN

Annida Rizky¹, Dadan Kurniansyah², Mochamad Faizal Rizki³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: 2010631180047@student.unsika.ac.id¹, dadan.kurniansyah@staff.unsika.ac.id²,
Mochamad.faizal@fisip.unsika.ac.id³

Abstrak

Di negara-negara berkembang, pembangunan menjadi pilar utama dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dengan demikian pada pelaksanaan nya pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, partisipasi merupakan keikutsertaan atau mengikuti setiap program dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari dukungan dan keikutsertaan anggota masyarakat itu sendiri, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan. peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa tamansari, Kecamatan Pangkalan kurang baik, Hal itupun menjadi pemicu kurangnya partisipasi masyarakat di desa tamansari dalam bentuk tenaga masih kurang. Padahal, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu pembangunan. Partisipasi tersebut bisa berupa keterlibatan dalam kegiatan perencanaan maupun dalam kegiatan pembangunan di Desa. Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di pedesaan masih kurang. Hal ini terlihat dari rendahnya Tingkat keterlibatan Masyarakat dalam berbagai proyek Pembangunan. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pembangunan menyebabkan rendahnya partisipasi ini.

Kata kunci: Pemerintah, Masyarakat, Partisipasi, Pembangunan Infrastruktu

Abstract

In developing countries, development is the main pillar in efforts to improve community welfare. Thus, in its implementation, the government can increase community participation in infrastructure development. Participation is participation or taking part in every program in activities carried out by the government which cannot be separated from the support and participation of community members. In itself, this research aims to determine the role of the village government in increasing community participation in Tamansari Village, Pangkalan District. The government's role in increasing community participation in Tamansari Village, Pangkalan District is not good. This is also the trigger for the lack of community participation in Tamansari Village in the form of insufficient personnel. In fact, community participation is very necessary to carry out development. This participation can take the form of involvement in planning activities or in development activities in the Village. Government efforts to increase community participation in infrastructure development in rural areas are still lacking. This can be seen from the low level of community involvement in various development projects. Lack of socialization and communication between the government and the community regarding the importance of participation in development causes this low participation.

Keywords: Government, Community, Participation, Infrastructure development

PENDAHULUAN

Di negara-negara berkembang, pembangunan menjadi pilar utama dalam Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahma et al., 2024). Dalam berbagai bidang, pembangunan merupakan faktor yang paling mendukung. Ini mencakup pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, dan bidang lainnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat global. (Oraboune, 2008) Mengatakan infrastruktur dan fasilitas di setiap bidang memang berbeda sesuai dengan fungsinya, namun pembangunan infrastruktur merupakan yang paling mempengaruhi kualitas hidup manusia diberbagai aspek. Pembangunan infrastruktur di pedesaan menjadi pendukung utama dalam meningkatkan kualitas dan kelancaran mobilitas manusia di berbagai bidang.

Menurut Hasan (2018) Infrastruktur menjadi prioritas utama bagi masyarakat global karena memfasilitasi dan mendukung kelancaran berbagai aspek mobilitas, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. (Group, 2017) Pemerintahan saat ini gencar mendorong pengadaan infrastruktur karena pada kenyataannya masih ada kekurangan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat di beberapa wilayah yang termasuk dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. (Kominfo, 2017) Mengingat kebutuhan infrastruktur yang berbeda di setiap wilayah, pemerintah harus mengelola pembangunan dengan cermat. Hal ini bertujuan untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam memperbaiki tatanan kehidupan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk dari terciptanya kemauan masyarakat dalam program pemerintah, terutama program pembangunan (Bappeda, 2017). Salah satu wujud kemauan ini adalah sikap mendukung terhadap pelaksanaan program pemerintah yang diwujudkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurut (Usman, 2020) Partisipasi masyarakat berperan sebagai faktor penentu keberhasilan satu program pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi daerah dan kelurahan sangat bergantung pada peran serta partisipasi aktif masyarakatnya, baik sebagai bagian dari sistem maupun sebagai individu, masyarakat merupakan komponen integral yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah. Prinsip dasar penyelenggaraan otonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kelurahan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah di daerah atau di kelurahan tidak hanya berada di tangan kepala daerah atau lurah saja, tetapi juga di tangan masyarakat itu sendiri. Perubahan global telah mempercepat persaingan di berbagai sektor, baik di Tingkat nasional maupun daerah, kondisi ini tidak dapat dihindari sehingga birokrasi pemerintah perlu melakukan perbaikan dan mencari alternatif baru untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka semakin kuat. Hal ini diatasi melalui manajemen dan administrasi yang efektif oleh Lembaga pemerintah, termasuk pemerintah Desa tamansari.

Dengan demikian pada pelaksanaannya pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, partisipasi merupakan keikutsertaan atau mengikuti setiap program dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari dukungan dan keikutsertaan anggota masyarakat itu sendiri (Nuah, 2014). Partisipasi masyarakat merupakan Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan sangat diperlukan agar program-program pemerintah dapat terlaksana dengan baik. Partisipasi masyarakat menunjukkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap pentingnya program-program pemerintah. Dengan berpartisipasi, masyarakat menyadari bahwa kegiatan yang ada bukan hanya tanggung jawab aparat pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mempererat solidaritas demi kesejahteraan bersama (Palopo, 2019).

Menurut Vina (2019) Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada dukungan masyarakat. tanpa partisipasi masyarakat, pemerintah tidak akan mencapai hasil yang optimal. (Rolia, 2013) Mengatakan selain membutuhkan keterlibatan masyarakat, pemerintah juga memerlukan strategi yang tepat agar program tersebut dapat terlaksana. Upaya untuk meningkatkan dan menetapkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh anggota masyarakat dan bukti nyata dari pemenuhan keinginan masyarakat. (Andrianus, 2023) pemerintah juga harus responsive terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan peka terhadap kebutuhan rakyatnya. Pemerintahan perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan mau mendengarkan keinginan mereka. Hal tersebut bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga dalam memberi diri langsung disetiap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dengan demikian dapat diharapkan adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar dapat mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan datang.

Pada kenyataannya, masih banyak masalah yang timbul dalam pemerintahan, baik dari peran pemerintah maupun partisipasi masyarakat. banyak warga desa yang kurang berpartisipasi karena sibuk bekerja atau tidak ingin terlibat, mereka hanya focus pada urusan masing-masing. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintahan setempat dengan masyarakat, sehingga partisipasi menjadi minim. Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis, peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di pedesaan belum optimal. Masyarakat mungkin merasa sudah berada dalam lingkungan perkotaan yang cenderung kurang peduli dalam berpartisipasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai fenomena sosial tertentu (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan akan dianalisis dan disekripsikan berdasarkan temuan temuan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan. Informan penelitian ini terdiri dari lurah, perangkat desa, dan masyarakat desa tamansari, kecamatan pangkalan dengan jumlah total 11 orang.

Pengumpulan data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan, Data sekunder merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut (Moleong, 2000) Analisa data kualitatif merupakan Upaya yang dilakukan mencakup pengelolaan data, mengorganisir data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, serta mengidentifikasi hal-hal penting dan pembelajaran, kemudian menyampaikan hasilnya kpd orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan Kesimpulan, dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu data dan fakta yang diperoleh selama penelitian di lapangan dideskripsikan atau digambarkan sebagaimana adanya, disertai dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Oleh karena itu, analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggabarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Dari hasil wawancara bersama 10 informan menunjukkan bahwasannya peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa tamansari, Kecamatan Pangkalan kurang baik. Salah satunya dari Kepala Desa Tamansari mengeluhkan bahwa beliau tidak tahu menau tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa tersebut, kepala desa hanya tahu tentang perencanaan nya saja. sehingga ia merasa sulit untuk menyampaikannya kepada masyarakat, dan pemerintah tidak memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan desa.

Hasil wawancara terhadap informan yang merupakan sebagai Kepala seksi pembangunan Desa Tamansari mengemukakan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa tamansari kurang bagus karena tidak memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dan juga tidak menerima informasi langsung tentang keinginan yang sangat dibutuhkan masyarakat desa dalam rencana pembangunan.

Lalu wawancara dengan RT setempat tidak menerima informasi yang transparan, sehingga masyarakat desa mengeluhkan bahwasannya mereka tidak tahu menau pada saat pelaksanaan pembangunan tersebut hal itupun menjadi pemicu kurangnya partisipasi masyarakat di desa tamansari dalam bentuk tenaga masih kurang. Padahal, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk melaksanakan suatu pembangunan. Partisipasi tersebut bisa berupa keterlibatan dalam kegiatan perencanaan maupun dalam kegiatan pembangunan di Desa. Namun, membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, perlu dilakukan Upaya-upaya untuk membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Hastra et al (2020) adapun hal yang harus dilakukan ialah dengan pemberdayaan masyarakat oleh perangkat desa. Diharapkan dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pembangunan merupakan sebuah proses dan usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik dari keadaan saat ini. Proses pembangunan ini dilakukan karena masyarakat merasa keadaan saat ini kurang ideal, namun, perlu diingat bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat perlu melakukannya secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah yang dihadapi. Pembangunan desa harus memiliki sasaran yang tepat agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pemerintah desa berperan dalam meningkatkan kesadaran warga desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga pembangunan dapat berhasil. Di Desa Tamansari pembangunan yang

dilakukan masih relative rendah. Pembangunan dianggap berhasil apabila dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa ada yang merasa dirugikan. Di Desa Tamansari, beberapa pembangunan sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, seperti pembangunan rumah layak huni yang kini cukup banyak dan layak ditempati. Namun masih ada pembangunan di Desa Tamansari yang belum dapat dinikmati, seperti pembangunan sumur bor. Masyarakat merasa sumur bor ini tidak bermanfaat karena air yang dihasilkan keruh dan berbau, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi.

Perlu adanya motivasi melalui kepemimpinan kepala desa dalam menimbulkan kesadaran masyarakat, karena hal ini juga sangat menentukan berhasilnya pembangunan di Desa Tamansari, Kecamatan Pangkalan.

SIMPULAN

Sebagai hasil akhir penelitian tentang peranan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur, dapat diambil Kesimpulan bahwasanya Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di pedesaan masih kurang. Hal ini terlihat dari rendahnya Tingkat keterlibatan Masyarakat dalam berbagai proyek Pembangunan. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dan Masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pembangunan menyebabkan rendahnya partisipasi ini. Selain itu, minimnya program pemberdayaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas Masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses Pembangunan juga menjadi factor penghambat. Akibatnya, banyak proyek infrastruktur yang tidak maksimal karena kurangnya dukungan dan partisipasi dari Masyarakat setempat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa, baik dalam bentuk uang atau benda, ide dan oikiran, maupun tenaga (Gotong royong), berdasarkan hasil penelitian masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya status sosial ekonomi rata-rata Masyarakat desa, rendahnya Tingkat Pendidikan mereka, serta kesibukan Masyarakat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

SARAN

Dari Kesimpulan tersebut pemerintah perlu memperbanyak sosialisasi dan komunikasi dengan Masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pembangunan infrastruktur. Informasi yang jelas dan transparan tentang proyek-proyek yang akan dilakukan dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan Masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya bisa lebih focus pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Ini bisa mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus, F., & Alfatih, K. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Kemiskinan: Analisis Data Panel 34 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 54–60. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.206>
- Bappeda. (2017). Teori Partisipasi: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>
- Eva Rolia. (2013). Dampak Pembangunan Bendung dan Sadapan Air. In *Tapak* (Vol. 2, pp. 1–9).
- Group, M. media. (2017). Penyebab Pembangunan Infrastruktur di Myanmar Tertinggal. https://kbr.id/indonesia/11-2017/penyebab_pembangunan_infrastruktur_di_myanmar_tertinggal_/93642.html
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal. In CV. Nur Lina.
- Hastra, O. :, Laia, A., Andi, D., & Perangin-Angin, R. (2020). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mangan Molih Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. *Jurnal Governance Opinion*, 5, 100–107.
- Kominfo. (2017). Pembangunan Infrastruktur Menjadi Salah Satu Kunci Indonesia Menjadi Negara Maju. <https://m.kominfo.go.id/content/detail/11450/pembangunan-infrastruktur-menjadi-salah-satu-kunci-indonesia-menjadi-negara-maju/0/berita>

- Moleong. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Nuah, V. Y. (2014). Peran Pemerintah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. Fisip Unsrat, 1–10.
- Oraboune, S. (2008). Infrastructure (Rural Road) Development and Poverty Alleviation in Lao PDR. INSTITUTE OF DEVELOPING ECONOMIES (IDE) Discussion Papers, 151, 2–74.
- Palopo, I. (2019). Pembimbing : 1 . Dr . H . Muammar Arafat , M . H.
- Rahma, M., Amir, H., Mustafa, H., Aulya, A., & Sadriani, A. (2024). ©JP-3 Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran ©Rahma dkk. 6(1), 70–74.
- Usman, M. T. (2020). Pengaruh Pembangunan Jalan Layang Tol Jakarta Cikampek II terhadap Pembentukan Struktur Perekonomian Jawa Barat. AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 15(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3779>
- Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. <https://jurnal.stkipgritulungagung.ac.id/index.php/jupeko/article/download/870/397>